



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.12.11/081/HK-KS/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH, KELURAHAN, BADAN USAHA
MILIK DAERAH, BADAN LAYANAN UNIT DAERAH, SERTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan untuk mengoptimalkan layanan Informasi publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Unit Daerah, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- m. Melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- n. Membantu penyelesaian sengketa informasi publik melalui upaya litigasi dan non-litigasi;
- o. Membantu melakukan klarifikasi dan klasifikasi kebenaran informasi yang ada dilingkungkannya untuk disampaikan kepada PPID.

- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Bapperida Kota Samarinda;
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);

18. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Unit Daerah, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya;
 - c. Membantu PPID Pelaksana mengklasifikasikan informasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Membantu PPID Pelaksana mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Membantu PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - f. Membantu PPID Pelaksana dalam melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - g. Membantu PPID Pelaksana melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - h. Membantu PPID Pelaksana menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Membantu PPID Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
 - j. Membantu PPID Pelaksana menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala;
 - k. Menyeleksi dan menguji data dan informasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang dibuka oleh publik;
 - l. Mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada PPID;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR : 500.12.11/081/HK-KS/VI/2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH, KELURAHAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN LAYANAN UNIT DAERAH, SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PPID PELAKSANA (PERANGKAT DAERAH, KELURAHAN, BUMD, BLUD, DAN UPTD LAINNYA)
1	2	3
PERANGKAT DAERAH		
1	Wandan Dewi Muriasari	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
2	Faradilla Sevdhianty	Bagian Umum Sekretariat Daerah
3	Agatha Sabrina Ajeng Kornelia Amanda, S.Tr.IP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	Faturrahman Alifadzri Arham	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
5	Arie Andarie	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6	Tantra Apriyadi, SE	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
7	Nicholas Putra Prima	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
8	Heni Arbayanti	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9	Ajeng Diah Ayu Pramuwati, S.Tr.IP	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
10	Abdul Gafur	Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
11	Ahmad Badawi Karim	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
12	Yuni Setianingsih, S.Pi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
13	Ferry Sachfiari A, SE	Sekretariat DPRD
14	Syahrial B, SE	Inspektorat Daerah
15	Yunda Nurvita Sari, S.IP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Maulidah, S.Si	Dinas Kesehatan
17	A. Helen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Januar Kusuma Zاتمika	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Hery Suhendra, SE	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20	Linda Sari	Satuan Polisi Pamong Praja
21	Hj. Noor Baity, SE	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
22	Reni Yuliana	Dinas Tenaga Kerja

1	2	3
23	Rachma Winda, S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Umar Usman	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Lia Desyrakhawati	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26	Aulani Sasmi	Dinas Lingkungan Hidup
27	Daisy Faradina, S.Kom	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Adriana Napitupulu, SP, M.Si	Dinas Perhubungan
29	Enny Ariatiningsih, SH	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	Ammar Ridho A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
31	Etna Paramita Sari	Dinas Perdagangan
32	Mustain Ramli	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Rika Handayani	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
34	Ahmad Afrizal Salim, S.Kom.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	Muhammad Nuryadin, S.AB	Dinas Perikanan
36	Ariadhy, S.Kom	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
37	Nur Aulia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
38	Ririn Dharmiyanti, SE	Badan Pendapatan Daerah
39	Ulfah Gerahani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40	Khairullah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41	Edy Hanwar, SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42	Yeni Sukirman	Kecamatan Palaran
43	Aminudin, S.Sos	Kecamatan Samarinda Seberang
44	Muhammad Ferly Imawan Achyan	Kecamatan Samarinda Ulu
45	Nurmiyati Saleh	Kecamatan Samarinda Ilir
46	Miat Dinata	Kecamatan Samarinda Utara
47	Riyanda Ilham Nuryadin	Kecamatan Sungai Kunjang
48	Muhammad Syahrial Fahri	Kecamatan Sambutan
49	Adie Stiawan, A.Md	Kecamatan Sungai Pinang
50	Gusti Risdah Agustina	Kecamatan Samarinda Kota
51	Anton Nuriyanto, SE	Kecamatan Loa Janan Ilir
KELURAHAN		
1	Denny Akhdiat Fajrin	Kelurahan Pelita
2	Charisma Aditya Nugraha	Kelurahan Selili
3	Nurfadilah Nasir	Kelurahan Sidodamai
4	Mayzanna Syafridha Kurniawan	Kelurahan Sidomulyo

1	2	3
5	Siti Halimatul Sa'diah	Kelurahan Sungai Dama
6	Noval Ardiansyah	Kelurahan Makroman
7	Rayen Prasad	Kelurahan Pulau Atas
8	Zulkarnain	Kelurahan Sambutan
9	Supardi, S.Sos.I	Kelurahan Sindang Sari
10	Muhammad Rizky Ananda, S.I.Kom	Kelurahan Sungai Kapih
11	Darmawati Badana, SE	Kelurahan Bugis
12	Amelia Nurhani	Kelurahan Karang Mumus
13	Mijan Syahrani	Kelurahan Pasar Pagi
14	Rinda Syafarina	Kelurahan Pelabuhan
15	Andi Hasan	Kelurahan Sungai Pinang Luar
16	Saikhudin	Kelurahan Air Hitam
17	Mohd. Achadie. SE	Kelurahan Air Putih
18	Wawan Saputra	Kelurahan Bukit Pinang
19	Endah Pristiwi Atiningsih, SE	Kelurahan Dadi Mulya
20	Ryan Ratmadhani	Kelurahan Gunung Kelua
21	Muhammad Farhan Azhar	Kelurahan Jawa
22	Winny Herwinda Sari	Kelurahan Sidodadi
23	Rizal Adzanyansyah	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
24	Norma Yunita	Kelurahan Budaya Pampang
25	Solikah	Kelurahan Lempake
26	Emma Fatima Soraya	Kelurahan Sempaja Barat
27	Rudi	Kelurahan Sempaja Utara
28	Ayu Novrizia, S.Hut	Kelurahan Sempaja Selatan
29	Nikmah	Kelurahan Sempaja Timur
30	Samsul Arif	Kelurahan Sungai Siring
31	Annisa Firizqi	Kelurahan Tanah Merah
32	Siti Fitriyah	Kelurahan Bandara
33	Selvia Handayani, SE	Kelurahan Gunung Lingai
34	Saiful Mujab	Kelurahan Mugirejo
35	Fitri Handayani, SM	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
36	Rizki Mairinda	Kelurahan Temindung Permai
37	Alinda Putri Anggreini	Kelurahan Loa Buah
38	Ade Rizki Hanafiah	Kelurahan Loa Bakung
39	Muhammad Afif Naufal	Kelurahan Loa Bahu
40	Kamaruddin, A.Md	Kelurahan Karang Anyar
41	Rony Tiara, A.Md	Kelurahan Karang Asam Ilir
42	Arie Purwa	Kelurahan Karang Asam Ulu
43	Noor Fitriani, SE	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
44	Anggia Wandana	Kelurahan Harapan Baru

1	2	3
45	Rezal	Kelurahan Rapak Dalam
46	Ayu Sylviana Rostandi	Kelurahan Sengkotek
47	Syarifuddin Nur	Kelurahan Simpang Tiga
48	Anata Riffiyah,S.Pd	Kelurahan Tani Aman
49	Elsa Yunita	Kelurahan Baqa
50	Ani Yuliani	Kelurahan Gunung Panjang
51	Muhammad Jafar	Kelurahan Mangkupalas
52	M. Noor Rahmat	Kelurahan Mesjid
53	Poerwondoborneosantoso, SP	Kelurahan Sungai Keledang
54	Warsih	Kelurahan Tenun
55	Isnania Kumala	Kelurahan Bantuas
56	Teddy Evan Wibowo	Kelurahan Bukuan
57	Dewi Luciana	Kelurahan Handil Bakti
58	Nadia Thoybah	Kelurahan Rawa Makmur
59	Alvin Kamal Ar Rashid	Kelurahan Simpang Pasir
BADAN USAHA MILIK DAERAH		
1	Muhammad Andarisa Satriawan	PERUMDAM Tirta Kencana
2	Yayat Apriadi	Perumda Varia Niaga
3	Anindya Ayunig Tyas	Bank Samarinda
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
1	Faramita Putri	Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis
2	Noor Rachman	Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda
3	Darta Fadilah, S. FARM	Puskesmas Palaran
4	Mulya Nur Qolby, A.Md.RMIK	Puskesmas Trauma Centre
5	Jumarni, SKM	Puskesmas Bantuas
6	Zakina Octaviano, SKM	Puskesmas Samarinda Kota
7	Siti Mila Rusitah	Puskesmas Baqa
8	Eva Sura Wuyo, A.Md	Puskesmas Bukuan
9	Anisa Marini, SKM	Puskesmas Air Putih
10	Muhammad Kasyful Anwar, S.Kom	Puskesmas Segiri
11	Arleni, AMKG	Puskesmas Lok Bahu
12	Rahayu Setiyawati	Puskesmas Wonorejo
13	drg. Muhammad Nur Huda	Puskesmas Lempake
14	Laila Fitri, SE	Puskesmas Makroman
15	Pahmi Hidayat, S.AP	Puskesmas Sungai Siring
16	Sukarti, S.Sos	Puskesmas Bengkuring

1	2	3
17	Dara Sucia Iskandar, SKM	Puskesmas Temindung
18	Hasniah	Puskesmas Harapan Baru
19	Sri Setyaningsih, SKM	Puskesmas Juanda
20	Veny Yusnica	Puskesmas Karangasam
21	Wiwin Widiyawati	Puskesmas Sidomulyo
UPTD Lainnya Puskesmas		
22	Ratna Liasari	Puskesmas Pasundan
23	Nurhasanah, SKM	Puskesmas Loa Bakung
24	drg. Irma Yunita Wijayanti, S.KG	Puskesmas Mangkupalas
25	Indah Rachma Yanti Shabirah, SKM	Puskesmas Sempaja
26	Dina Kartikasari, SKM	Puskesmas Sungai Kapih
27	Adhytya Prawira Saputra, S.KEP	Puskesmas Sambutan
28	Lestiani Aulia Hasmy, SKM	Puskesmas Remaja
29	Muhammad Faisal	Instalasi Farmasi Kota Samarinda

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN